

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Konsep Kemiskinan

Dalam kajian ilmu sosial, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai norma masyarakat. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural dan memerlukan intervensi kebijakan publik (Buni, 2025).

Struktur sosial yang tidak setara menempatkan sebagian kelompok dalam posisi yang kurang menguntungkan, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya pendidikan, keterbatasan modal sosial, dan minimnya akses terhadap perlindungan sosial (Suryanto, 2011). Dengan demikian, penanganan kemiskinan memerlukan intervensi kolektif melalui kebijakan negara dan program sosial yang terencana.

Sejalan dengan itu, Amartya Sen memandang kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas (*capability deprivation*), yaitu ketidakmampuan individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai, seperti memperoleh pendidikan, kesehatan, dan berpartisipasi dalam Masyarakat (Iswahyudi et al., 2024). Perspektif ini menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup

melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga harus memperluas akses terhadap layanan dasar dan memperkuat kapasitas individu (Adon et al., 2023). Oleh karena itu, kebijakan yang tepat sasaran, didukung oleh akurasi data dan efektivitas birokrasi, menjadi faktor penting dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan.

Dari perspektif ilmu politik, kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai kinerja negara dalam menjalankan fungsi kesejahteraan. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai bagian dari kewajiban politik dan sosial (Mohamad, 2025). Program bantuan sosial, seperti bantuan tunai, pangan, pendidikan, dan kesehatan, merupakan instrumen kebijakan untuk menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Hutapea, 2022). Dengan demikian, kemiskinan dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi multidimensional yang menjadi dasar bagi negara dalam merumuskan kebijakan perlindungan sosial melalui berbagai program bantuan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Konsep Bantuan Sosial

Sebagai respons kebijakan terhadap permasalahan kemiskinan, Bantuan sosial merupakan instrumen utama negara dalam merespons permasalahan kemiskinan. Bantuan sosial dijalankan melalui mekanisme birokrasi rasional-legal yang ditandai oleh aturan formal, hierarki kewenangan, serta profesionalisme aparatur. Program ini ditujukan kepada individu atau rumah tangga yang mengalami risiko sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, kerentanan, dan kondisi darurat, baik dalam bentuk bantuan material maupun

nonmaterial (Herlambang, 2025). Dalam konteks ini, bantuan sosial tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap kelompok rentan.

Dalam kerangka kebijakan kesejahteraan, bantuan sosial berfungsi sebagai mekanisme redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Esping-Andersen menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari sistem *welfare state* yang bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui intervensi negara, termasuk melalui proses dekomodifikasi yang mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pasar (Fauzi et al., 2025). Oleh karena itu, bantuan sosial tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari upaya struktural dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, bantuan sosial juga berperan dalam menjaga stabilitas dan kohesi sosial. Distribusi bantuan yang tepat sasaran dapat mengurangi ketimpangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan (Huda, 2024).

Keberhasilan bantuan sosial juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi. Aparatur dituntut tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mampu mengelola data, berkoordinasi lintas sektor, dan merespons kondisi sosial masyarakat secara efektif. Dari perspektif kebijakan publik, bantuan sosial merupakan hasil dari proses yang melibatkan berbagai aktor, sehingga memiliki dimensi administratif sekaligus politik dalam menjaga legitimasi pemerintah (Hipnuludin, 2025).

Secara yuridis, penyelenggaraan bantuan sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pada Pasal 8 ditegaskan bahwa penanganan fakir miskin dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan, salah satunya pemberian bantuan sosial. Selanjutnya, Pasal 10 mengatur bahwa penetapan sasaran penanganan fakir miskin dilakukan berdasarkan data yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan Pasal 11 mengamanatkan agar data tersebut diverifikasi dan divalidasi secara berkala untuk menjamin akurasi dan kemutakhiran data (Susmita, 2020).

Dengan demikian, bantuan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai instrumen kebijakan yang keberhasilannya ditentukan oleh integrasi antara desain kebijakan, kapasitas birokrasi, dan kualitas sistem pendataan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan.

2.1.3 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Dalam rangka meningkatkan kualitas data penerima bantuan sosial, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan tersebut menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan satu basis data nasional sebagai acuan dalam penyelenggaraan berbagai program pembangunan, termasuk program bantuan sosial (Syam, 2025). Kehadiran DTSEN merupakan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai sumber data sehingga mampu mengurangi duplikasi data, meningkatkan akurasi sasaran, serta mendukung penyelenggaraan bantuan sosial yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengatur mekanisme pemanfaatan, verifikasi, validasi, pemutakhiran, dan pengelolaan data secara berkelanjutan (Athaya, 2026). Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Sosial memiliki peran dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data, mengusulkan perubahan data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), serta memastikan data yang dimanfaatkan dalam penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai basis data administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyaluran bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan, tetapi juga oleh kualitas data yang digunakan sebagai dasar penetapan penerima manfaat. Oleh karena itu, keberadaan DTSEN menjadi instrumen penting dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Data merupakan prasyarat utama dalam menjamin rasionalitas kebijakan bantuan sosial. Sistem administrasi yang berbasis aturan menuntut penggunaan data yang objektif agar pengambilan keputusan tidak bersifat subjektif, melainkan didasarkan pada kondisi empiris Masyarakat (Akhdan, 2026). Dalam konteks ini, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berfungsi sebagai instrumen administratif yang mengintegrasikan

informasi sosial ekonomi secara sistematis guna mendukung efektivitas dan legitimasi kebijakan kesejahteraan.

DTSEN merupakan basis data nasional yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penetapan sasaran program bantuan sosial. Keberadaannya bertujuan menciptakan keseragaman data antarinstansi, mengurangi duplikasi penerima, serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran kebijakan (Wijayanti et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *evidence-based policy* yang menekankan pentingnya penggunaan data dalam pengambilan keputusan publik. Sejalan dengan hal tersebut, Kettunen dan Kallio menyatakan bahwa pemanfaatan data dapat meningkatkan kualitas kebijakan, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan efektivitas program pemerintah (Ana et al., 2025).

Meskipun demikian, pengelolaan data sosial ekonomi menghadapi tantangan karena sifatnya yang dinamis. Perubahan kondisi masyarakat, seperti pekerjaan, pendapatan, dan struktur rumah tangga, tidak selalu tercatat secara cepat dalam sistem, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antara data administratif dan kondisi riil (Widya, 2025).

Selain itu, kualitas data sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dalam melakukan pemutakhiran dan verifikasi secara berkala. Proses ini memerlukan koordinasi lintas instansi dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga keberhasilan DTSEN tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh tata kelola dan kinerja aparatur. Dari perspektif kebijakan publik,

penggunaan data yang akurat dapat meningkatkan ketepatan intervensi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Lebih lanjut, DTSEN berperan sebagai instrumen perencanaan strategis yang menyediakan data yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas kebijakan kesejahteraan. Dengan demikian, DTSEN tidak hanya berfungsi sebagai sistem pendataan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan yang menghubungkan kebijakan, kapasitas birokrasi, dan kondisi sosial masyarakat dalam mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih tepat sasaran.

2.1.4 Birokrasi dalam Perspektif Ilmu Politik

Birokrasi merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam perspektif Ilmu Politik, birokrasi tidak hanya dipahami sebagai organisasi administratif yang menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi juga sebagai instrumen negara yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan-tujuan politik dan kesejahteraan Masyarakat (Kadarisman, 2021). Birokrasi menjadi penghubung antara negara dengan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Menjadi bagian dalam negara modern, birokrasi dipahami sebagai organisasi yang bekerja berdasarkan pembagian tugas, hierarki kewenangan, aturan formal, dan profesionalisme aparatur. Melalui karakteristik tersebut, birokrasi diharapkan mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan akuntabel yang bertujuan memenuhi kepentingan masyarakat.

Dalam kajian Ilmu Politik, birokrasi juga berkaitan dengan konsep kapasitas negara (*state capacity*), yaitu kemampuan negara dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik secara efektif (Rusfiana et.al, 2021). Kapasitas negara yang kuat tercermin dari kemampuan birokrasi dalam memberikan pelayanan publik, mengelola sumber daya, serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kualitas birokrasi menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik.

Selain itu, birokrasi memiliki peran penting dalam politik kesejahteraan (*welfare politics*). Dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial (Sukmana, 2016). Salah satu bentuk implementasi kebijakan kesejahteraan tersebut adalah program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam penelitian ini, birokrasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memiliki peran penting dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap birokrasi menjadi penting untuk memahami bagaimana kapasitas aparatur dan mekanisme kelembagaan memengaruhi pelaksanaan kebijakan bantuan sosial

agar dapat berjalan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

2.1.5 Teori Birokrasi Max Weber

Teori birokrasi Max Weber dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan analisis untuk memahami bagaimana Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menjalankan fungsi administratif dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada penyaluran bantuan sosial tahun 2025. Menurut Weber, birokrasi merupakan bentuk organisasi rasional-legal yang disusun berdasarkan pembagian kerja yang jelas, hierarki kewenangan, aturan formal tertulis, serta profesionalisme aparatur (Sudrajat, 2022).

Birokrasi rasional-legal dibangun atas dasar legalitas dan rasionalitas, sehingga setiap tindakan dan keputusan aparatur didasarkan pada peraturan yang berlaku dan dilaksanakan secara impersonal. Aparatur dituntut untuk bekerja secara objektif, profesional, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal. Melalui mekanisme tersebut, birokrasi diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, efisiensi, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan publik (Salim, 2023).

Salah satu karakteristik utama birokrasi menurut Weber adalah adanya hierarki kewenangan yang tersusun secara bertingkat. Hierarki tersebut memungkinkan adanya pembagian tanggung jawab dan pengawasan yang jelas dalam setiap tingkatan organisasi. Selain itu, pembagian kerja yang didasarkan pada spesialisasi tugas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kompetensi masing-masing aparatur.

Karakteristik lainnya adalah adanya aturan formal yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi birokrasi. Aturan formal tersebut berfungsi untuk menjamin keseragaman prosedur, menciptakan kepastian administrasi, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, aparatur birokrasi juga dituntut memiliki profesionalisme yang tercermin melalui kompetensi, tanggung jawab, dan orientasi pada pelayanan publik.

Namun demikian, Weber juga mengakui bahwa birokrasi dapat menghadapi berbagai keterbatasan, seperti prosedur yang terlalu kaku, struktur organisasi yang hierarkis, serta kecenderungan administratif yang berlebihan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelayanan publik apabila tidak diimbangi dengan kapasitas aparatur yang memadai dan mekanisme koordinasi yang baik.

Dalam penelitian ini, teori birokrasi Max Weber digunakan untuk menganalisis aspek-aspek struktural dan administratif dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada penyaluran bantuan sosial di Kota Tasikmalaya tahun 2025. Analisis dilakukan dengan memperhatikan beberapa karakteristik utama birokrasi menurut Weber, yaitu hierarki kewenangan, pembagian kerja, aturan formal dan prosedur administrasi, serta profesionalisme aparatur. Hierarki kewenangan digunakan untuk melihat hubungan dan pembagian tanggung jawab antarunit dalam organisasi, pembagian kerja digunakan untuk menganalisis spesialisasi tugas aparatur dalam pengelolaan bantuan sosial, aturan formal dan prosedur

administrasi digunakan untuk memahami mekanisme pelaksanaan kebijakan yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sedangkan profesionalisme aparatur digunakan untuk menganalisis kompetensi dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Melalui aspek-aspek tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana struktur dan mekanisme birokrasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memengaruhi pemanfaatan DTSEN dalam penyaluran bantuan sosial.

2.1.6 Teori Street-Level Bureaucracy Michael Lipsky

Teori *Street-Level Bureaucracy* diperkenalkan oleh Michael Lipsky melalui karyanya *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services* yang diterbitkan pada tahun 1980. Menurut Lipsky, keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh peraturan dan struktur organisasi, tetapi juga oleh aparatur pelaksana yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Aparatur tersebut disebut sebagai *street-level bureaucrats*, yaitu pegawai pemerintah yang berada pada tingkat pelaksanaan dan memiliki hubungan langsung dengan penerima layanan publik.

Dalam perspektif Lipsky, pelaksana kebijakan di tingkat lapangan memiliki peran penting karena mereka tidak hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan, tetapi juga menghadapi berbagai kondisi sosial yang kompleks serta keterbatasan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan sering kali melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan kebijakan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan

demikian, implementasi kebijakan pada praktiknya tidak sepenuhnya ditentukan oleh peraturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh tindakan dan keputusan aparatur di tingkat lapangan.

Pelaksanaan kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses interaksi antara aparatur dengan masyarakat. Intensitas interaksi tersebut menjadikan aparatur pelaksana memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi riil masyarakat dibandingkan dengan pembuat kebijakan di tingkat atas. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.

Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, pendamping sosial memiliki peran penting sebagai pelaksana kebijakan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Pendamping sosial terlibat dalam proses verifikasi dan validasi data, pendampingan masyarakat, serta penyampaian informasi terkait program bantuan sosial. Selain itu, pendamping sosial juga berperan dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, keberadaan pendamping sosial menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran bantuan sosial.

Teori *Street-Level Bureaucracy* Michael Lipsky digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran pelaksana kebijakan tingkat lapangan dalam pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) pada penyaluran bantuan sosial di Kota Tasikmalaya tahun 2025. Analisis dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu interaksi pelaksana dengan

masyarakat, peran pelaksana lapangan dalam implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya, serta penyesuaian pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi masyarakat. Interaksi pelaksana dengan masyarakat digunakan untuk melihat hubungan antara aparatur, khususnya pendamping sosial, dengan masyarakat penerima bantuan sosial. Peran pelaksana lapangan digunakan untuk menganalisis kontribusi pendamping sosial dalam proses verifikasi, validasi, dan penyesuaian data. Keterbatasan sumber daya digunakan untuk memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan penyesuaian pelaksanaan kebijakan terhadap kondisi masyarakat digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksana lapangan merespons perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, teori *Street-Level Bureaucracy* melengkapi teori birokrasi Max Weber yang lebih menekankan aspek struktur organisasi dan administrasi, sehingga kedua teori tersebut dapat digunakan secara komplementer dalam menganalisis pemanfaatan DTSEN pada penyaluran bantuan sosial di Kota Tasikmalaya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian
1	Good Governance dalam Penyelenggaraan Pelayanan Sosial di Pemerintah Daerah	Hidayat, 2022	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas, memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan sosial. Lemahnya penerapan prinsip tersebut berdampak pada rendahnya legitimasi publik terhadap program bantuan sosial. Penelitian ini relevan karena memberikan kerangka normatif dalam memahami praktik birokrasi yang rasional dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.
2	Kinerja Birokrasi Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	Alfrida, 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi dalam penyaluran bantuan sosial belum optimal. Berdasarkan perspektif kinerja birokrasi Agus Dwiyanto, masih

	Pada Dinas Sosial Kabupaten Langkat		ditemukan kelemahan pada aspek produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas akibat keterbatasan sumber daya aparatur serta perbedaan data dalam pengawasan. Selain itu, faktor tujuan organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan kualitas kerja turut memengaruhi efektivitas birokrasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik.
3	Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial	Putri & Ramdhan, 2023	Penelitian ini menemukan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial dipengaruhi oleh lemahnya pemutakhiran data, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi, serta terbatasnya koordinasi antarlembaga pemerintahan. Upaya yang dilakukan meliputi penguatan validasi data secara partisipatif, optimalisasi peran aparatur lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pendataan. Penelitian ini relevan karena menyoroti praktik birokrasi dalam menghadapi persoalan

			ketepatan sasaran bantuan sosial.
4	Kapasitas Birokrasi dalam Implementasi Program Bantuan Sosial di Pemerintah Daerah	Wahyuni, 2024	Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi yang meliputi kompetensi aparatur, kejelasan pembagian tugas, serta kepatuhan terhadap prosedur sangat memengaruhi efektivitas implementasi bantuan sosial. Kelemahan kapasitas birokrasi berkontribusi terhadap keterlambatan penyaluran dan rendahnya kualitas pelayanan. Temuan ini selaras dengan konsep birokrasi rasional-legal Max Weber yang menekankan pentingnya aturan formal dan struktur kewenangan yang jelas.
5	Transformasi Kebijakan Publik: Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Desa Pringsurat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik.	Purbaningrum & Hermawan, 2024	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan sasaran bantuan sosial disebabkan oleh lemahnya proses identifikasi penerima serta kurangnya netralitas aparatur desa. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan distribusi bantuan dan berpotensi menurunkan kepercayaan

			masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan birokrasi untuk mewujudkan distribusi bantuan sosial yang lebih rasional dan tepat sasaran.
--	--	--	---

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai bantuan sosial dari (Hidayat, 2022; Alfrida, 2024; Putri & Ramdhan, 2023; Wahyuni, 2024; Purbaningrum & Hermawan, 2024) menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial dipengaruhi oleh prinsip *good governance*, kinerja birokrasi, kapasitas aparatur, serta kualitas data dan koordinasi kelembagaan. Permasalahan yang sering muncul meliputi ketidaktepatan sasaran, lemahnya pemutakhiran data, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya netralitas aparatur, yang berdampak pada kualitas pelayanan dan legitimasi publik. Hal ini menegaskan bahwa bantuan sosial tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola birokrasi dan relasi antara negara dan masyarakat.

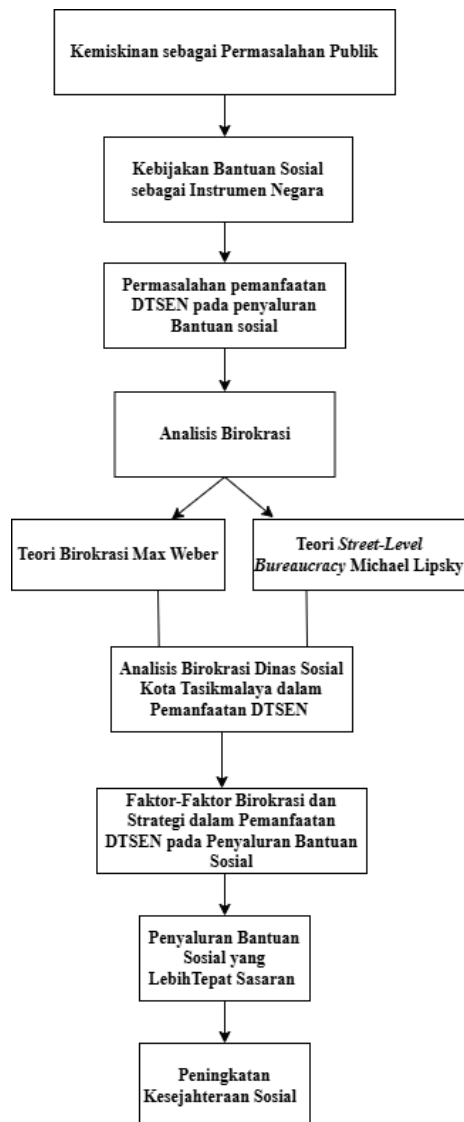
Namun demikian, masih terdapat kesenjangan konseptual dan empiris dalam kajian yang ada. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan analisis antara kinerja birokrasi, kualitas data, dan implementasi kebijakan, sehingga belum membentuk pendekatan yang integratif. Selain itu, kajian yang secara spesifik menyoroti peran Dinas Sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) masih terbatas, terutama dalam melihat

interaksi antara kapasitas birokrasi, praktik lapangan, dan akurasi data terhadap efektivitas bantuan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran Dinas Sosial dalam pemanfaatan DTSEN serta implikasinya terhadap efektivitas bantuan sosial di Kota Tasikmalaya tahun 2025, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam peningkatan kualitas implementasi kebijakan sosial.

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2. 1 Bagan kerangka berpikir



Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari kemiskinan sebagai permasalahan publik yang memerlukan intervensi negara melalui kebijakan bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi bagian penting dalam menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Namun, berbagai permasalahan dalam pemanfaatan data dan implementasi kebijakan masih dapat memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori birokrasi Max Weber dan teori *Street-Level Bureaucracy* Michael Lipsky untuk menganalisis birokrasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam pemanfaatan DTSEN pada penyaluran bantuan sosial tahun 2025. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini berupaya memahami faktor-faktor birokrasi serta strategi pemanfaatan DTSEN dalam mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.